

Sofia Trisni, Apriwan & Poppy Irawan | Strategi Indonesia dalam Merespon
Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Laut
Tiongkok Selatan)

**Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa
Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok
Selatan)**

Apriwan * Poppy Irawan ** & Sofia Trisni ***
sofi_hi01@yahoo.com

Abstract

Dunia Internasional pada abad 21 ditandai dengan fenomena kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok ini direspon secara beragam oleh negara-negara yang ada dunia. Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh Indonesia dalam merespon kebangkitan Tiongkok pada era presiden SBY dengan menggunakan setting Konflik Laut Tiongkok Selatan sebagai arena yang mempertemukan Indonesia dengan Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya. Tulisan ini menemukan bahwa strategi yang digunakan oleh Indonesia dalam merespon kebangkitan Tiongkok adalah strategi engagement melalui ASEAN dan hedging dengan memperbanyak opsi yang dimiliki oleh Indonesia.

Keywords: Foreign Policy, Engagement, Hedging, ASEAN

Pendahuluan

Kebangkitan Tiongkok telah menarik perhatian dunia internasional, beragam pandangan terhadap fenomena ini pun bermunculan; ada yang memandangnya sebagai sebuah kesempatan baik dan ada pula yang menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Kesempatan baik berkaitan dengan keuntungan untuk ikut maju bersama perekonomian Tiongkok yang terus menanjak, sedangkan ancaman berkaitan dengan kekhawatiran akan bagaimana Tiongkok menggunakan kekuatannya. Kaum realis memandang kebangkitan Tiongkok sebagai sebuah ancaman terhadap supremasi Amerika.¹ John Mearsheimer, seorang *offensive realist* berpendapat bahwa Tiongkok akan mencoba untuk mendominasi dunia dan akan memastikan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa menyainginya.² Bukan hanya itu, skenario terburuk yaitu Tiongkok akan menguasai dunia dan memindahkan fokus kekuatan hegemoni dari Barat ke Timur, seperti yang diungkapkan oleh Martin Jacques:

Shanghai will replace New York and London as the world's centre of

¹D. Dou, "The Rise of China : Conflict or Harmony in East Asia?" in Er, Lam Peng (ed), *The rise of China and India : A new Asian Drama*, World Scientific Publishing Company, 2009, p.12

²J.J Mearsheimer, "China's unpeaceful Rise", *Current History* 105:690, 2006, p.1

financial power. Mandarin will replace English as the global language. People will celebrate the great discoverer He Zheng rather than Christopher Columbus...etc.³

Sedikitnya, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat luar biasa pada tiga dekade terakhir semenjak tahun 1980 telah merubah arti pentingnya Tiongkok bagi negara lain, terutama di Asia. Bersama Jepang dan Korea Selatan, Tiongkok merupakan negara eksportir yang paling besar di Asia Timur, partner dagang terbesar ASEAN, negara importir terbesar ketiga bagi Indonesia.⁴Khusus bagi Indonesia, signifikansi hubungan dagang kedua negara terlihat dari meningkatnya angka perdagangan bilateral. Antara 2005-2007, angka perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat sebanyak US\$5 triliun dari US\$ 12.5 triliun menjadi US\$18.2 triliun yang menempatkan Tiongkok sebagai patner perdagangan terbesar ketiga pada tahun 2006.⁵

Dengan meningkatnya arti penting Tiongkok dan seiring dengan

³P. J. Katzenstein, "China's rise : rupture, return, or recombination?" in P.J Katzenstein (ed), *Sinization and the Rise of China: Civilizational processes beyond East and West*, Routledge, 2012

⁴T. Shiraishi, "The rise of China and its implications for East Asia", in P.J Katzenstein (ed), *Sinization and the Rise of China: Civilizational processes beyond East and West*, Routledge, 2012

⁵I. Storey, *Southeast Asia and the Rise of China : the search for security*, Rourledge, 2011, p.205

berlangsungnya "power shift" di Asia⁶, sangat penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Tiongkok. Akan tetapi, peningkatan kapabilitas militer Tiongkok yang cepat dan kurangnya transparansi negara ini telah memicu kecemasan di Asia Timur, termasuk di Indonesia. Storey mencatat bahwa:

*In Asia, China's rising power and arms build-ups has stirred anxiety... It is important to bring into the open this underlying sense of discomfort, even insecurity, about the political and military ambitions of China.*⁷

Karena itulah, Indonesia harus dapat memilih strategi yang tepat untuk dapat menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, mengingat hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahli Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Rizal Sukma, bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur sedang dihadapkan dengan permasalahan yang rumit yang berkaitan dengan bagaimana cara merespon kebangkitan Tiongkok dengan baik.⁸ Sayangnya jika

kita menilik ke strategi yang digunakan oleh Indonesia, ketidakjelasan terlihat disini, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai strategi yang paling tepat dalam merespon kebangkitan Tiongkok ini.

Perdebatan tersebut terlihat dari perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli Hubungan Internasional, seperti Evan Laksmana yang berpendapat bahwa strategi Indonesia terhadap Tiongkok sangatlah ambivalen⁹, sementara kebanyakan ahli lain beranggapan bahwa Indonesia menggunakan strategi *hedging*. Syamsul Hadi, Akademisi dari Universitas Indonesia, berargumen bahwa Indonesiamengadopsi strategi *constructive engagement*.¹⁰ Argumen Rizal Sukma sedikit berbeda dalam hal ini. Sukma berargumen bahwa selain menerapkan strategi *hedging*, Indonesia juga menggunakan strategi *engagement* dengan menggunakan ASEAN.¹¹ Argumen Sukma ini menjadi menarik karena pada kenyataannya, Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ASEAN, sehingga penulis tertarik untuk meneliti respon Indonesia

⁶Lihat misalnya Hugh White, "Power Shift: Rethinking Australia's Place in the Asian History" *Australian Journal of International Affairs*, 65:1, 81-93, 2011

⁷I. Storey, *Southeast Asia and the Rise of China*, p.44

⁸R. Sukma, "ASEAN and the Major Power in new emerging order" in J. Tsunekawa (ed), *Regional order in East Asia: ASEAN and Japan Perspectives*, NIDS Joint Research Series No.1, National Institute for Defence study, Tokyo 2007, p.84

⁹E.A. Laksmana, "Indonesia's dance with the titans", *Today online*, 27 March 2010, <http://www.toddayonline.com/print/weekendvoices>

¹⁰S. Hadi, *Menyikapi Kebangkitan China*, Kompas, 2 September 2008

¹¹R. Sukma, "Indonesia's response to the rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties" in Jun Tsunekawa (eds) *The Rise of China: Responses from Southeast Asia and Japan*, Tokyo

terhadap kebangkitan China dengan melakukan testing terhadap argumen Sukma tersebut. Untuk menguji kedua argumen Sukma tersebut, penulis akan menggunakan studi kasus sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan, yang merepresentasikan gambaran kompleks dari hubungan antara Indonesia, Tiongkok dan negara ASEAN lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pendahuluan, penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam meneliti, penjelasan mengenai *engagement* dan *hedging* serta pembahasan.

Metodologi

Tulisan ini menggunakan metode yang unik untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu dengan cara menguji dua argumen Rizal Sukma mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok. Dalam monografinya, Rizal Sukma berargumen bahwa: Reaksi Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkok di luar bidang ekonomi dapat digolongkan menjadi dua: yang pertama, Indonesia mencoba meng-*engage* Tiongkok melalui ASEAN dan yang kedua, ketidakpastian akan lamanya atensi Tiongkok terhadap

Indonesia telah mendorong Indonesia untuk melakukan strategi *hedging*.¹²

Penulis menggunakan sengketa di Laut Tiongkok Selatan sebagai kawasan untuk meneliti interaksi antara Indonesia dan Tiongkok. Lebih spesifik, untuk meneliti apakah memang Indonesia mencoba untuk mengikat Tiongkok dengan menggunakan ASEAN, penulis akan meneliti interaksi antara Indonesia dan Tiongkok dalam usaha perumusan *Code of Conduct* di Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa Indonesia memang menerapkan strategi *hedging*, penulis akan meneliti mengenai meningkatnya keasertifan Tiongkok dan kehadiran Amerika di kawasan. Melalui kedua fenomena tersebut, penulis akan mendapatkan jawaban apakah benar respon strategis Indonesia dalam menanggapi kebangkitan Tiongkok adalah memang dengan menggunakan strategi *engagement* dan *hedging*.

Tulisan ini akan menggunakan metode kualitatif yang akan berfokus pada riset pustaka. Riset ini akan meneliti jurnal-jurnal internasional yang terkait dengan konflik LTS, termasuk kejadian-kejadian aktual yang dimuat oleh harian

¹²R. Sukma, "Indonesia's response to the rise of China...."

berita terpercaya seperti CNN, BBC, New York Times dan Aljazeera untuk kemudian digunakan sebagai data yang dianalisis.

Selanjutnya, tulisan ini menggunakan 2 strategi dalam merespon kekuatan baru menurut ilmu hubungan internasional, yaitu strategi *engagement* dan *hedging*.

Strategi pertama yang digunakan dalam tulisan ini adalah strategi *engagement*. Strategi ini menurut Schweller, merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam merespon kebangkitan sebuah kekuatan baru. Schweller mendefinisikan strategi ini sebagai :

Engagement refers to the use of non-coercive means to ameliorate the non-status quo elements of a rising major power's behaviour. The goal is to ensure that this growing power is used in ways that are consistent with peaceful change in regional and global order. The most common form of engagement is the policy of appeasement, which attempts to settle international quarrels "by admitting and satisfying grievances through rational negotiation and compromise, thereby avoiding the resort to an armed conflict which would be expensive, bloody and possible very dangerous".¹³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi *engagement* ini mengutamakan penyelesaian

permasalahan dengan jalan damai, yang dapat dilakukan melalui negoisasi ataupun kompromis. Tujuan utama strategi ini adalah untuk menghindarkan negara untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, seperti penggunaan senjata yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara fisik ataupun mental. Jadi, negara dapat dikatakan menggunakan strategi ini, jika terlihat aksi-aksi untuk mengajak negara terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Cara damai ini bisa jadi melalui negoisasi dan kompromis yang keduanya dapat dilaksanakan melalui institusi internasional.

Strategi kedua yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah strategi *hedging*. Goh, dalam *Policies Studies no 16* mendefinisikan *hedging* sebagai "as a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality".¹⁴ Sementara Sukma mengartikan *hedging* sebagai "a strategy to prevent the worst (saiaku) while trying

¹³R.L. Schweller, "Managing the rise of great powers : history an theory" in A.I. Johnston an R.S. Ross (eds), *Engaging China*, Routledge, 1999, p.14,

¹⁴E. Goh, *Meeting the China Challenge : The US in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Centre, Washington ,2005, p.viii

to construct the best".¹⁵ Selain itu, Roy, seorang ahli Hubungan Internasional berargumen bahwa "*hedging implies a present condition of strategic uncertainty*".¹⁶ Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, Ciorciari menambahkan bahwa negara-negara berkembang memilih untuk memiliki pilihan strategis yang terbuka (banyak pilihan).¹⁷ Lebih lanjut, Sukma menambahkan bahwa negara memutuskan untuk tidak menerapkan satu strategi saja di kawasan dimana terdapat kekuatan utama didalamnya.¹⁸ Sejalan dengan itu, Goh menyatakan bahwa negara-negara berkembang ini akan memilih untuk berada di posisi tengah, sehingga tidak harus mengambil resiko dalam berhadapan dengan kekuatan lainnya.¹⁹

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *hedging* merupakan sebuah strategi yang diterapkan ketika negara belum berani untuk memilih strategi yang *straight forward* karena takut akan resiko yang akan didapatkan jika negara memilih untuk berpihak kepada salah satu pihak.

¹⁵R.Sukma, "ASEAN and the Major Power in new emerging order", p.86

¹⁶Roy, p.306

¹⁷J. D.Ciorciari,, *The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers since 1975*, Georgetown University Press, Washington D.C., 2010.p.135

¹⁸R.Sukma, "ASEAN and the Major Power in new emerging order", p.86

¹⁹E. Goh, *Meeting the China Challenge*, p.viii

Pada akhirnya negara memilih untuk berada ditengah-tengah, sehingga tidak satu negarapun merasa terganggu dengan negara tersebut.

Pembahasan

Pada bagian ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis respon strategis Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkok. Bagian ini terdiri atas empat sub bagian yang diawali dengan penjelasan singkat mengenai hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang sedikit banyaknya mempengaruhi hubungan kedua negara. Selanjutnya penulis akan memaparkan penjelasan mengenai konflik di Laut Tiongkok Selatan sebagai kawasan di mana kepentingan Indonesia, Tiongkok dan ASEAN bertemu. Pada sub bagian ketiga, penulis akan meneliti proses pembuatan Code of Conduct (CoC) di Laut Tiongkok Selatan untuk mengetahui apakah benar Indonesia melakukan strategi *engagement* dengan menggunakan ASEAN, sedangkan pada sub bab keempat penulis akan melihat meningkatnya sifat asertif Tiongkok di LTS yang kemudian memancing kehadiran Amerika Serikat untuk mengetahui apakah Indonesia benar menerapkan strategi *hedging*.

Gejolak hubungan Indonesia dengan Tiongkok

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebangkitan Tiongkok merupakan kepedulian yang besar bagi Indonesia. Sebagai sebuah negara yang secara geografi berlokasi relatif berdekatan dengan Tiongkok, Indonesia merasakan dampak positif dan juga negatif dari kebangkitan Tiongkok, yang membuat Indonesia harus menggunakan respon strategis secara berhati-hati. Sub bab ini akan menjelaskan secara singkat mengenai turun naiknya hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, yang sedikit banyaknya merupakan akar dari respon Indonesia terhadap Tiongkok.

Karakteristik hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dapat dikatakan naik turun. Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok untuk pertama kalinya pada tanggal 13 April 1950,²⁰ negara kedua di Asia Tenggara yang membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok setelah Vietnam. Hubungan kedua negara mencapai puncaknya pada tahun 1963—1965 ketika konflik antara Indonesia dan Malaysia

sedang memanas.²¹ Hubungan kedua negara kemudian memburuk pada tahun 1965 ketika pemberontakan PKI terjadi.²² PKI yang beraliran Komunis memiliki hubungan yang dekat dengan Tiongkok, dan disinyalir bahwa Tiongkok ikut terlibat dalam pemberontakan PKI.²³ Dibawah pimpinan Mayor Jenderal Suharto, PKI berhasil diberangus dan kemudian diikuti dengan pengumuman pembekuan hubungan diplomatik kedua negara pada tanggal 23 Oktober 1967 dan diikuti oleh Beijing lima hari kemudian.²⁴ Priode orde baru merupakan periode anti komunis dan penuh kecurigaan kepada Tiongkok.

Normalisasi hubungan dengan Tiongkok dimulai ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Wu Xueqian bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar Kusumaatmadja dan Presiden Suharto pada Konferensi Asia Afrika di Bandung dan Jakarta pada tanggal 24-25

²⁰Embassy of PRC in Indonesia, "Sekilas Hubungan bilateral" (bilateral relations of China—Indonesia), <http://id.china-embassy.org/indo/zgyyn/sbgxgk/> view online 15 November 2013

²¹A. L. Smith, "From Latent Threat to Possible Partner : Indonesia's China Debate", *Asia-Pacific Centre for Security Study Special Assessment*, 2003, view online 16 April 2013
http://www.apcss.org/Publications/SAS/ChinaDebate/ChinaDebate_SmithIndo.pdf, p.2

²²Embassy of PRC in Indonesia

²³R.Sokolsky, A. Rabasa & C.R Neu, *ASEAN Perceptions of Rising China*, RAND, 2000, p.38

²⁴A. L. Smith, "From Latent Threat to Possible Partner, p.2

April 1985.²⁵ Pada pertemuan tersebut, Wu meyakinkan Indonesia bahwa PRC tidak memiliki hubungan dengan PKI selama 18 tahun belakangan, dan meyakinkan Indonesia bahwa Tiongkok tidak tertarik untuk mencampuri urusan domestik Indonesia.²⁶ Pertemuan tahun 1985 ini dapat dikatakan sebagai awal mula membaiknya hubungan diplomatik kedua negara. Pada tahun 1990, hubungan diplomatik antara kedua negara kembali dibuka.²⁷ Walaupun demikian, kecurigaan ABRI terhadap komunis belum dapat dikikis sepenuhnya.²⁸

Citra positif Tiongkok di mata Indonesia kemudian mulai naik pada saat krisis Asia terjadi pada tahun 1997-1998. Pada saat itu, Beijing menolak untuk men *devalue* mata uangnya dan memberikan asistensi yang cepat melalui IMF untuk membantu negara-negara Asia yang terkena konflik.²⁹ Bantuan ini sedikit banyaknya memperbaiki *image* Tiongkok

di mata Indonesia, bahwa Tiongkok sebagai sesama negara Asia bergerak dengan cepat untuk memastikan negara-negara yang terkena krisis tidak jatuh lebih dalam. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 ini membawa kejatuhan bagi Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Suharto digantikan oleh B.J Habibie yang merupakan wakil presiden pada masa itu. Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok selama masa Presiden Habibie³⁰, kemungkinan karena keadaan domestik yang kacau pada saat itu, sehingga fokus Habibie lebih ke dalam negeri.

Hubungan Indonesia dan Tiongkok memasuki fase baru ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999. Presiden Wahid menjadikan Tiongkok sebagai negara tujuan pertama kunjungannya setelah dilantik pada bulan Oktober 1999.³¹ Presiden Wahid mengumumkan kebijakan “Look towards Asia” yang termasuk di dalamnya keinginan untuk berhubungan baik dengan Tiongkok.³² Rizal Sukma berargumen bahwa setidaknya ada tiga alasan

²⁵J.M van der Kroef, “Normalizing’ Relations with China : Indonesia’s Policies and Perceptions”, *Asian Survey*, Vol.26. No.8 (1986), pp.909-934 : 909

²⁶J.M van der Kroef, p.910

²⁷I.J Storey, “Indonesia’s China Policy in the New Order and Beyond : Problems and Prospect”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22, No.1 (2000), pp.145-174 :148

²⁸I.J Storey, “Indonesia’s China Policy, p.148

²⁹G. Nabbs-Keller, “Growing Convergence, Greater Consequence : The Strategic Implications of Closer Indonesia-China Relations”, *Security Challenges*, Vol. 7 No.3, 2011, pp.23-41, p.27

³⁰G. Nabbs-Keller, p.27

³¹R. Sukma, “Indonesia-China Relations : the Politics of Re-engagement”, p.596

³²A.L. Smith, “Indonesia’s Foreign Policy under Abdurrahman Wahid : Radical of Status Quo State?”, *Contemporary Southeast Asia*, V.22, No.3, December 2000, 498-525 : 512

pemerintahan Presiden Wahid dalam membangun hubungan yang kuat dengan Tiongkok ; pertama, perasaan kekecewaan terhadap dominasi Barat dalam sistem internasional, termasuk di dalamnya perasaan merasa dikhianati saat lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Kedua, Presiden Wahid berharap penguatan hubungan dengan Tiongkok dapat meningkatkan kepercayaan etnis Tionghoa Indonesia kepada negara, sehingga dana besar yang di bawa keluar dari Indonesia pada saat kerusuhan Mei dapat dibawa pulang ke Indonesia kembali, yang akan dapat menstimulasi perekonomian Indonesia. Presiden Wahid berharap untuk mendapatkan dukungan Tiongkok di dunia internasional dalam hal pengelolaan konflik separatisme yang sedang dihadapi Indonesia di Aceh, Papua, Maluku dan daerah-daerah lainnya.³³ Terlihat di sini, bahwa berhubungan baik dengan Tiongkok dapat memberikan keuntungan yang besar kepada Indonesia, sehingga pemerintahan Wahid berusaha sedemikian rupa untuk dapat mendekatkan hubungan kedua negara.

Pemerintahan setelah Presiden Wahid, yaitu pemerintahan Presiden

Megawati dan Presiden SBY tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kedua presiden, berusaha untuk terus menjalin hubungan baik dengan Tiongkok. Puncaknya terjadi pada tahun 2005 ketika Jakarta dan Beijing menandatangani Kemitraan Strategis.³⁴

Konflik Laut Tiongkok Selatan

LTS merupakan kawasan laut seluas 3.5 juta kilometer persegi, termasuk Teluk Thailand³⁵ yang terbentang dari pantai barat daratan Asia Tenggara, Kalimantan dan Kepulauan Filipina.³⁶ LTS menghubungkan Asia timur laut dan Pasifik bagian barat ke Samudera Hindia dan Timur Tengah³⁷, dimana jalur ini dilewati oleh sepertiga dari total kapal dunia.³⁸ Disamping posisinya yang strategis, kawasan laut ini juga menyimpan sumber daya alam yang

³⁴I.J Storey, "Indonesia's China Policy, p.148

³⁵G.Zhiguo, "South China Sea : Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation" in Saw Swee-Hock, Sheng Lijun & Chin Kin wah (eds), *ASEAN – China Relations Realities and Prospect*, ISEAS, Singapore 2005, p.330

³⁶M. Weasley. "What's at stake in the South China Sea", *Lowy Institute for International Policy*, 2012, <http://www.lowyinstitute.org/publications/whats-stake-south-china> view 6 Sep 2012,p.1

³⁷A.S.P. Baviera.'The South China Sea Disputes after the 2002 Declaration : Beyond Confident Building' in Saw Swee-Hock, Sheng Lijun & Chin Kin wah (ed), *ASEAN –China Relations Realities and Prospect*, ISEAS, Singapore 2005, p. 344

³⁸M. Weasley. "What's at stake....p.1

³³R. Sukma , "Indonesia's response to the rise of China : Growing Comfort amid Uncertainties" in Jun Tsunekawa (eds) *The Rise of China : Responses from Southeast Asia and Japan*, Tokyo 2009, pp. 145-7

potensial di dalamnya, yaitu hidrokarbon dan sumber daya ikan yang sangat kaya.³⁹ Tidak heran, karena kekayaannya tersebut, LTS menjadi wilayah yang diklaim secara tumpang tindih oleh 6 negara yaitu: Tiongkok, Taiwan (bukan sebuah negara secara teknis), Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.⁴⁰

Selain bagi Indonesia, klaim Tiongkok di LTS juga mengganggu Amerika Serikat. Amerika menginginkan LTS sebagai lautan internasional, yang memberikan kebebasan kepada setiap warga dunia untuk melewatinya, termasuk juga kebebasan dalam melaksanakan berbagai penelitian dan juga kebebasan untuk melakukan latihan perang. Jika wilayah ini diklaim oleh Tiongkok, Amerika merasa terganggu *freedom of navigation*-nya, sehingga penting sekali bagi Amerika untuk memastikan bahwa LTS tetap menjadi lautan internasional.

Di luar permasalahan tumpang tindihnya klaim terhadap kawasan laut tersebut, LTS memiliki kekhususan bagi Indonesia dan hirauan bagi Amerika. Klaim Tiongkok yang terkenal dengan “9 *dotted-lines*” telah mengganggu wilayah ZEE Indonesia di utara kepulauan Natuna

yang kaya akan Gas Alam.⁴¹ Menjaga stabilitas wilayah merupakan keinginan Indonesia, negara ini tidak menginginkan penjaran konflik yang dapat mengganggu keamanan Indonesia.⁴²

Apakah Indonesia menggunakan strategi *engagement* melalui ASEAN?

Untuk meneliti apakah benar Indonesia menggunakan framework ASEAN untuk mengikat Tiongkok, Tulisan ini meneliti usaha Indonesia dalam pembuatan CoC, khususnya setelah kegagalan Asean Ministerial Meeting (AMM) tahun 2012.

Indonesia sepakat dengan pandangan para pengamat politik⁴³ bahwa CoC adalah solusi terbaik untuk mengurangi tensi di LTS. Pada sebuah meeting dengan Hillary Clinton pada tanggal 4 September 2012, Menlu Natalegawa mengatakan bahwa “ketiadaan CoC, ketiadaan proses diplomasi, kita dapat meyakini bahwa akan insiden yang lebih banyak lagi akan

⁴¹S. Hongfang, “South China Sea Issue in China-ASEAN Relations : An Alternative Approach to Ease the Tension”, *International Journal of China Studies*, V.2, No.3, Dec 2011, pp. 585-600, p.588

⁴²President Yudhoyono as quoted by Antara, “Presiden soroti potensi konflik perbatasan sebagai tantangan” *President highlighted the potential of the border conflict as a challenge*, *SHNews*, 16 August 2012, view online <http://www.shnews.co/detile-6473-president-soroti-potensi-konflik-perbatasan-sebagai-tantangan.html> 22 October 2012

⁴³ Lihat misalnya Evan Laksmana, Dewi Fortuna Anwar, C.Tayer, etc

³⁹M. Weasley. “ What’s at stake...”,p.1

⁴⁰M. Weasley. “ What’s at stake...”,p.1

terjadi dan tensi akan terus meningkat di kawasan (Asia Tenggara) kita ini.⁴⁴ Karena itulah Indonesia sangat berkomitmen untuk memfasilitasi terciptanya CoC ini. Pada kesempatan lain, Presiden SBY menekankan pentingnya CoC pada sebuah forum pada tanggal 17 Juli 2012: “*a meaningful and practicable code of conduct in the South China Sea is central to improving confidence building, it will help enhance predictability and bolster stability in a region that desperately needs it*”.⁴⁵ Keinginan untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai, dengan tidak menggunakan kekerasan merupakan pemahaman dasar dari strategi *engagement*, sehingga dengan memfasilitasi terciptanya panduan untuk berperilaku di LTS, Indonesia dapat dipastikan tidak ingin terjadi penyelesaian konflik dengan kekerasan. Panduan pada CoC akan memandu setiap negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan dengan damai. Pernyataan Menlu Natalegawa dan Presiden SBY ini sesuai dengan strategi *engagement*.

Indonesia terlibat secara aktif dalam menemukan solusi ketegangan di LTS dengan menggunakan ASEAN sebagai media. Keterlibatan aktif Indonesia ini tidaklah mencengangkan, yang setidaknya didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, tidak dapat dipungkiri bahwa ASEAN menempati posisi yang penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia,⁴⁶ sehingga tidak mengherankan bahwa dalam setiap tindakan Indonesia akan selalu “melirik” ASEAN. Bukan itu saja, lokasi konflik berada dekat dengan kepulauan Indonesia. Bisa dipahami, jika konflik di antara negara-negara tersebut melebar, maka keamanan Indonesia pun akan ikut terganggu. Dalam pidatonya pada pembukaan *the Strategic Review Journal* di New York pada tanggal 26 September 2012, Presiden SBY menyatakan bahwa: “*Also of great concern to us are the overlapping territorial and sovereignty claims to all or parts of the South China Sea*”⁴⁷ Jika digabungkan, kedua alasan diatas saling

⁴⁴Natalegawa sebagaimana yang dikutip oleh S.Adam, “Indonesia key to Resolving tension in South China Sea”, *Epoch Times*, 7 September 2012

⁴⁵Presiden Yudhoyono sebagaimana yang dikutip oleh A. Manners, “China Strengthen ties with Indonesia, ASEAN as Obama stays grounded”, *Strategic Analysis*, 9 Oktober 2013

⁴⁶D.F. Anwar, “Posisi dan Peran Strategis Indonesia dalam konstalasi Politik Internasional”(Indonesia’s strategic position and role in the constellation of International Politic) , in S. Hartono; H. Djarab and L.Irahali (eds), *Semangat Kebangsaan dan Politik Luar Negeri Indonesia* (the Spirit of Nationality and Indonesia’s Foreign Policy), Angkasa Bandung, 2002, p.502

⁴⁷Presiden SBY, Keynote speech at the launching of the Strategic Review Journal”, New York 26 September 2012

berkaitan satu dan lainnya. Karena ASEAN merupakan pijakan bagi kebijakan luar negeri Indonesia, maka setiap permasalahan yang terjadi di kawasan ini yang menjadi kepedulian Indonesia akan selalu menggunakan ASEAN dalam penyelesaiannya.

Selain itu faktor eksternal dari ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. ASEAN berharap banyak bahwa Indonesia akan ikut turun tangan dalam penyelesaian konflik yang melibatkan negara-negara ASEAN. Keinginan ini dapat terlihat jelas dari pernyataan Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh pada tahun 2013, “*We look forward to coordinating with the member states especially Indonesia*”.⁴⁸Pernyataan ini sedikit banyaknya memperlihatkan harapan besar dari ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan negara-negara ASEAN, sehingga mau tidak mau Indonesia pun terikat dengan ASEAN guna menyelesaikan permasalahan LTS.

Selain alasan di atas, persepsi yang diletakkan pada Indonesia sebagai natural Leader di kawasan ASEAN telah

mempengaruhi sikap Indonesia.⁴⁹ Ketika terjadi permasalahan di kawasan ini, maka Indonesia akan merasa terhimbau untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam menjaga keutuhan ASEAN. Sehingga siapapun, pemimpin ASEAN-nya, dia pasti akan berharap lebih kepada Indonesia, karena persepsi Indonesia sebagai *natural leader*-nya ASEAN ini.

Keinginan Indonesia untuk menggunakan ASEAN dalam meng-*engage* Tiongkok setidaknya terlihat dari usaha yang dilakukan Indonesia setelah gagalnya tercipta Joint Communique pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) tahun 2012 lalu. Indonesia meletakkan harapan yang tinggi pada forum ini, melalui forum ini Indonesia berharap terciptanya suara yang bulat di dalam tubuh ASEAN, sehingga *Draft of Conduct* di LTS dapat dihasilkan. Setelah kegagalan AMM, Presiden SBY segera mengirimkan surat kepada negara-negara anggota ASEAN, berharap dukungan

⁴⁸BBT Saragih, “ASEAN chief pushes RI to act on South China Sea dispute”, *The Jakarta Post*, 9 April 2013

⁴⁹S. Hadi, “Indonesia, ASEAN and the Rise of China : Indonesia in the midst of East Asia’s Dynamics in Post-Global Crisis World”, *International Journal of China Studies*, V.3, No.2, Agustus 2012, 151-166, p.155

mereka terhadap usaha Indonesia dalam
melahirkan CoC di LTS.⁵⁰

Kepedulian Indonesia akan suara
bulat di ASEAN tak pelak karena
Indonesia ingin menggunakan ASEAN
sebagai wadah untuk meng-engage
Tiongkok. Jika ASEAN tidak bersatu,
maka akan sulit sekali bagi Indonesia
untuk dapat menggunakan ASEAN,
seperti yang diungkapkan oleh D.
Blumenthal, Direktur Asian Studies pada
American Enterprise Institute, bahwa
dengan tercerai berainya ASEAN, maka
“*victory will be on the Chinese side*”.⁵¹
Pemahaman inilah yang kemudian
membuat Indonesia berusaha sekuat
tenaga untuk menjaga keutuhan suara
dalam ASEAN, agar penggunaan ASEAN
dalam menghadapi Tiongkok menjadi
lebih mudah.

Keinginan untuk mengikat
Tiongkok kepada ASEAN sepertinya
terkait erat dengan persepsi Indonesia
bahwa jika Tiongkok tidak dihadapi secara
kolektif maka negara ASEAN yang kecil

dan lemah akan begitu mudahnya
dikalahkan oleh Tiongkok.⁵² Indonesia
merasa bahwa penyelesaian hubungan
secara bilateral bukanlah jalan keluar yang
baik untuk negara-negara ASEAN,
Indonesia berharap dapat membawa
Tiongkok pada satu meja dan mengikatnya
dengan aturan yang ada di ASEAN,
sehingga penyelesaian masalah ini dapat
dilakukan dengan menggunakan ASEAN
way. Sehingga, penyelesaian konflik ini
tidak akan menggunakan strategi yang
diinginkan Tiongkok, tetapi strategi yang
diinginkan oleh ASEAN.⁵³

Apakah Indonesia menggunakan strategi *hedging* terhadap Tiongkok

Bagian ini akan meneliti hubungan
antara Tiongkok, Indonesia dan Amerika
di LTS. Melalui interaksi ketiga negara ini
akan dilihat apakah Indonesia memang
menggunakan strategi *hedging* terhadap
Tiongkok.

Pada bagian tinjauan pustaka,
penulis telah menjelaskan pengertian dari
strategi *hedging*. Agar Indonesia dikatakan
menerapkan strategi ini, maka haruslah
terlihat bahwa Indonesia memiliki lebih
dari satu strategi dalam menghadapi
Tiongkok. Lebih lanjut, harus dapat terlihat
bahwa Indonesia memilih berada di

⁵⁰L.C. Sebastian, “Indonesia regional diplomacy :
Imperative to maintain ASEAN cohesion”,
RSIS Commentaries No.132/2012, 23 July
2012

⁵¹D. Blumenthal as quoted by P.Barta, “Sea
Dispute Upends Asian Summit”, *The Wall
Street Journal*, 23 July 2012, view online
[http://www.intellectualltakeout.org/library/ar
ticles-commentary-blog/sea-dispute-upends-
asian-summit](http://www.intellectualltakeout.org/library/articles-commentary-blog/sea-dispute-upends-asian-summit) 11 September 2012

⁵²J. Brown, p.12

⁵³J. Brown, p.12

tengah-tengah dan tidak memilih salah
satu dari Amerika ataupun Tiongkok.

Peningkatan Sikap Asertif Tiongkok di LTS

Walaupun Tiongkok mencoba
meyakinkan dunia bahwa kebangkitannya
adalah kebangkitan yang damai dan dapat
menghasilkan keuntungan bagi semua
pihak,⁵⁴ aksi-aksi asertif di LTS tetaplah
membuat semua negara yang terlibat
menjadi waspada. Pada tahun 2013,
Tiongkok memperlihatkan sikap yang
tegas, bahwa jika pihak lain yang
bersengketa tidak bersedia untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan *win win basis*, maka Tiongkok
tidak akan segan-segan untuk
menggunakan "*tough tactics at both the
rhetorical and substantive levels*".⁵⁵

Tough tactics Tiongkok yang
diterapkan pada *substantive
levels* memperlihatkan manifestasinya
melalui kehadiran militernya di LTS
dengan tujuan untuk mempertegas
kedaulatannya di wilayah itu. Dari tahun
2010, Beijing telah memperbanyak dan
memperbaiki kualitas fasilitas militernya
di Pulau Paracels dan Spratly, termasuk

⁵⁴M.C.Ott, "Deep Danger : Competing claim in the
South China Sea", *China and East
Asia*, V.110, Issue 737, September 2011, 238

⁵⁵W. Lam, "Beijing's Aggressive New Foreign
Policy and implications for the South China
Sea", *China Brief*, Vo. XIII, Issue 13, June
12, 2013, p.12

landasan penerbangan dan
pertahanan. Lebih lanjut, negara ini
meningkatkan jumlah latihan militer,
patroli reguler dan mengumumkan
larangan untuk memancing di areal yang
dipersengketakan; yang meningkatkan
keyakinan dari negara-negara sekitar
bahwa Tiongkok meningkatkan sikap
asertifnya di sini.⁵⁶ Pada tahun 2010, PLA
mengadakan latihan militer yang
melibatkan lebih dari 100 kapal dan 1800
orang marinir.⁵⁷ Pada tanggal 7 Maret
2011, Menteri Luar Negeri Yang Jiechi
mengumumkan pelarangan eksplorasi
minyak di daerah yang diklaim Cina
sebagai teritorialnya.⁵⁸ Pada tahun 2012,
Cina mengumumkan bahwa mereka telah
mendirikan markas militer di Woody
Island, yang merupakan bagian dari grup
kepulauan Paracel, walaupun markas
militer tersebut masih dalam kapasitas
yang terbatas.⁵⁹

Bukan itu saja, Cina juga
menunjukkan perluasan kapasitas
militernya dengan menempatkan 3 divisi
pesawat tempur, dua divisi amfibi, dua

⁵⁶Swaine and Fravel, "China's assertive behaviour,
Part Two : The Maritime Periphery", *China
Leadership Monitor* No.35 2012, p.5

⁵⁷C. Ungerer, "Making mischief : the return of the
South China Sea dispute" *ASPI Special
Report*, Issue 36, December 2010, p.1

⁵⁸C.A Thayer, "China's new wave...p.3

⁵⁹I. Storey, "Slipping away? A south China Sea
Code of Conduct Eludes Diplomatic
efforts", *East and South China Seas Bulletin*
No.11, Center for a new American Security,
March 20, 2013, p.3

brigade laut dan tujuh grup operasi khusus yang kesemuanya dilengkapi dengan kemampuan untuk berperang.⁶⁰ Lebih lanjut, Cina juga memperkuat persenjataannya dengan 24 buah SU-30MK2 yang merupakan kapal pesiar yang dilengkapi dengan senjata perang.⁶¹ Dengan semua inovasi militer dan perkembangan sikap yang lebih tegas di LTS, tidak mengherankan jika dunia internasional beranggapan bahwa Cina memang sedang mengalami peningkatan sikap asertif yang kemudian perlu diwaspadai oleh negara sekitar.

Kepentingan Amerika Serikat di LTS

Konflik LTS telah mengundang AS untuk ikut terlibat, karena kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut di wilayah laut ini, selain keinginan untuk tetap mempertahankan kedudukannya di wilayah Pasifik. Rowan berargumen bahwa setidaknya ada dua kepentingan AS di LTS: Pertama, ancaman terhadap kebebasan navigasi dan kedua, AS tidak ingin Cina menguasai akses ke LTS.⁶² Pernyataan ini juga diperkuat dengan pernyataan dari United States Institute of

Peace pada tahun 1996 yang menjelaskan kepedulian panjang AS terhadap LTS :

*Safety of navigation and over flight and the freedom of sea lanes of communication are critical strategic interest of the United States, which uses the South China Sea as a transit point and operating area for the U.S navy and air force between military bases in Asia and the Indian Ocean and Persian Gulf areas. Any military conflict in the South China Sea that threaten the strategic interest of the United states or the Security and economic interest of Japan might be seen as sufficiently destabilizing to invite U.S involvement to preserve navigational freedom in these critical sea lanes.*⁶³

AS menginginkan kawasan ini sebagai perairan internasional, sehingga menurut Hukum Internasional, latihan militer dan pengumpulan data inteligen diizinkan untuk dilakukan.⁶⁴

Kutipan diatas menjelaskan bahwa AS memiliki kepentingan di LTS yang berkaitan dengan kebebasan untuk berlayar dan terbang disekitaran wilayah LTS. Jelas kebebasan yang dimaksud menunjukkan keberatan AS atas klaim Cina terhadap LTS, yang lebih lanjut bermakna bahwa setiap penggunaan areal

⁶⁰I. Storey, Making mischief : the return of the South China Sea dispute”*ASPI Special Report*, Issue 36, December 2010,p.7

⁶¹I. Storey, Making mischief

⁶²J.P Rowan, “The U.S – Japan security alliance, ASEAN and the South China Sea Dispute”, *Asia Survey*, Vol.45, No.3, June 2005, pp.414-436,p.429

⁶³United States Institute of Peace, “The South China Sea Dispute : Prospect for Preventive Diplomacy”, *Special Report*, No.18, August 1996, p.4

⁶⁴M. Weasley, “What Stake in the South China Sea”, *Lowy Institute for International Policy*, 2012, <http://www.lowyinstitute.org/publications/whats-stake-south-china> view 6 Sep 2012,p.5

laut ini akan membutuhkan izin dari Cina, artinya Cina berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan kapal/pesawat untuk melintasi kawasan ini. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh AS.

Selain alasan diatas, kepentingan ekonomi AS juga mengalami ancaman dengan klaim yang dibuat Cina. AS ingin mengamankan perusahaannya yang memiliki proyek pengeboran minyak bumi di wilayah konflik, seperti yang diungkapkan oleh *Deputy Assistant Secretary for East Asian and Pacific Affairs* yang bernama Scott Marciel yang mengungkapkan bahwa keberadaan Exxon mobil di LTS mengalami ancaman karena konflik ini.⁶⁵

Semua alasan di atas kemudian membingkai kepentingan AS di LTS, sehingga sikap asertif yang ditunjuk oleh Cina dapat diklasifikasikan sebagai gangguan bagi AS.

Indonesia diantara AS dan Cina

Telah dijelaskan diatas bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik di LTS. Komitmen ini kemudian membuat Indonesia bertemu dengan dua negara besar, yaitu AS dan Cina, yang menghasilkan kesulitan bagi Indonesia

⁶⁵I. Storey, *Making mischief*, p.6

dalam menerapkan strategi yang tepat. Ketakutan Indonesia dalam memilih salah satu negara diungkapkan Iin Gindarsah yang merupakan peneliti isu-isu pertahanan dari CSIS, dalam artikelnya, Gindarsah mengungkapkan bahwa Indonesia harus bertindak sangat hati-hati sehingga tidak terlihat keinginan untuk pro AS ataupun pro Cina.⁶⁶

Pandangan yang sama juga ditunjukkan oleh Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 2004-2009, Juwono Sudarsono yang menyatakan bahwa :

*We want to maintain a strategic space from the rivalry between the United States and China.....We can navigate between that rivalry, from time to time giving out signals that both the United States and China are important to us, because if we align ourselves too closely, it would be detrimental to the core values of Indonesia's foreign policy.*⁶⁷

Sejalan dengan itu, Syamsul Hadi, akademisi dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus mampu menyeimbangkan kedua kekuatan,

⁶⁶D. Safitri, "Kartu Indonesia dalam konflik Laut China selatan", *BBC Indonesia*, 15 July 2013, view online http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130614_indonesiadefencedynamic.shtml, 21 October 2013

⁶⁷J. Sudarsono as quoted by N. Onishi, "Obama and China play rival suitors to Indonesia", *The New York Times*, 9 November 2010 view online http://www.nytimes.com/2010/11/10/world/asia/10indo.html?_r=0, accessed 26 November 2013

sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang aman di tengah-tengah.⁶⁸ Lebih lanjut, Presiden SBY menekankan bahwa “*I will not adopt a theory where one power counterbalances another, but I perceive that there must be a dynamic equilibrium among all players*”.⁶⁹

Jika dilihat dari pernyataan-pernyataan tokoh sentral di Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka semua menyarankan dan menginginkan Indonesia untuk memilih berhubungan secara netral, tidak memilih salah satu kekuatan, tetapi berusaha untuk menjadi sebuah keseimbangan yang dinamis, yang lebih lanjut dapat diartikan sebagai keinginan untuk berdiri di tengah kedua negara.

Indonesia, sepertinya menggunakan kondisi kontes di LTS sebagai ajang uji mumpung. Keterlibatan Indonesia sebagai negara paling berpengaruh di ASEAN telah membuat AS dan Cina berusaha untuk memperebutkan “hati” Indonesia. Memperebutkan hati ini kemudian dilakukan dengan memberikan bantuan kepada Indonesia, dengan harapan

Indonesia akan melirik kepada negara tersebut. Bentuk nyata dari pernyataan di atas adalah penandatanganan *strategic partnership* antara Indonesia dan Cina pada tahun 2005⁷⁰ yang kemudian diikuti dengan perjanjian kerjasama Pertahanan tahun 2007 yang diperkuat dengan penguatan kerjasama berbasis teknologi.⁷¹ Kerjasama ini kemudian diwujudkan melalui latihan perang bilateral antara Indonesia dan Cina pada tahun 2011 dan 2012.⁷² Bentuk praktek uji mumpung lain yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menerima tawaran Amerika untuk melakukan latihan militer yang diadakan di Malang Jawa Tengah dengan melibatkan beberapa negara peserta.⁷³

Tidak hanya itu, keberadaan AS – Indonesia – Cina di LTS juga memberikan keuntungan dalam hal bantuan ekonomi. Pada tahun 2012, Cina menawarkan untuk membangun sistem penjagaan di sepanjang pantai Indonesia dengan nilai bantuan sekitar \$158 juta untuk melengkapi sistem lama yang dibangun oleh AS yang bernilai \$57 juta.⁷⁴ Aksi ini kemudian ditindak lanjuti oleh AS dengan

⁶⁸S. Hadi, “Indonesia, ASEAN, and the Rise of China : Indonesia in the Midst of East Asia’s Dynamics in the Post-Global Crisis World”, *International Journal of China Studies Vol.3 No.2*, August 2012, pp.151-166 : 161

⁶⁹President Yudhoyono as quoted by A. Siahaan, “China, US step up rivalry

⁷⁰I. Lianti p.137

⁷¹E.A. Laksmana, “Variation on a theme pp30-31

⁷²The National Institute for Defense Studies, *East Asian Strategic Review 2013*

⁷³The National Institute for Defense Studies, *East Asian Strategic Review 2013*

⁷⁴R.A Supriyanto, “Indonesia’s South China Sea.....p.2

memenuhi keinginan Indonesia untuk membeli helikopter AH-64. Sepertinya, kebijakan yang diambil oleh Indonesia adalah kebijakan yang pragmatis, yang tidak memihak kepada satu pihak, tetapi mencoba mendekati kedua belah pihak.

Penjelasan di atas menghasilkan asumsi bahwa Indonesia tidak menerapkan sebuah strategi langsung sebagai respon terhadap kebangkitan Cina. Seperti kita ketahui, ada berbagai macam strategi dalam HI untuk kasus seperti ini. Strategi langsung adalah seperti *balancing* yang mencoba untuk menghimpun beberapa kekuatan sehingga mampu mengimbangi negara yang sedang bangkit ataupun strategi *bandwagoning* yang secara langsung tunduk kepada negara yang sedang bangkit. Di sini terlihat bahwa Indonesia tidak dapat dikatakan menerapkan satu strategi secara penuh, sehingga jika digabungkan, strategi yang dilakukan Indonesia adalah berhubungan baik dengan kedua negara, berusaha untuk tidak terlihat pro pada satu pihak dan di sisi lain, tetap mencari alternatif yang baik dalam berhubungan dengan kedua negara. Ditilik lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Indonesia memanglah strategi *hedging*, mengingat terpenuhinya unsur-unsur yang memperlihatkan kecenderungan kearah hal tersebut.

Kesimpulan

Tulisan ini telah menjabarkan mengenai kebangkitan Cina dan pentingnya bagi Indonesia untuk menerapkan strategi yang tepat dalam merespon fenomena tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa strategi Indonesia terhadap Cina adalah *engagement* melalui ASEAN dan *hedging*. *Engagement* melalui ASEAN terlihat dari usaha Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan konflik dengan Cina dengan menggunakan bingkai ASEAN, Indonesia terlihat terus-menerus menginginkan penyelesaian masalah dengan membawa serta seluruh negara ASEAN, mengingat negara ASEAN yang kecil akan sangat mudah untuk dikalahkan oleh Cina jika penyelesaian konflik dilakukan secara bilateral. Untuk mendorong Cina setuju penyelesaian masalah dengan menggunakan ASEAN, Indonesia melakukan dua cara, yaitu diplomasi kepada ASEAN sehingga ASEAN menyelesaikan permasalahan ini secara kolektif dan dengan melakukan diplomasi langsung secara bilateral terhadap Cina, dengan harapan negara tersebut mau menyelesaikan permasalahan ini di forum ASEAN.

Sementara itu, *hedging* terlihat dari sikap Indonesia yang tidak

memperlihatkan pro kepada salah satu pihak dengan gamblang. Indonesia berusaha untuk tetap bekerjasama dengan kedua belah pihak, berusaha memanfaatkan kedua negara untuk kemajuannya. Strategi yang dipilih Indonesia bukanlah strategi langsung yang jelas, sehingga di sini aplikasi dari strategi *hedging* terlihat jelas.

References

- D. Dou, "The Rise of China: Conflict or Harmony in East Asia?" in Er, Lam Peng (ed), *The rise of China and India : A new Asian Drama*, World Scientific Publishing Company, 2009, p.12
- J.J Mearsheimer, "China's unpeaceful Rise", *Current History* 105:690, 2006, p.1
- T. Shiraishi, "The rise of China and its implications for East Asia", in P.J Katzenstein (ed), *Sinization and the Rise of China: Civilizational processes beyond East and West*, Routledge, 2012
- P. J. Katzenstein, "China's rise : rupture, return, or recombination?" in P.J Katzenstein (ed), *Sinization and the Rise of China: Civilizational processes beyond East and West*, Routledge, 2012
- Storey, *Southeast Asia and the Rise of China : the search for security*, Rourledge, 2011, p.205
- R,Sukma, "ASEAN and the Major Power in new emerging order" in J. Tsunekawa(ed) , *Regional order in East Asia : ASEAN and Japan Prespectives*, NIDS Joint Research Series No.1, National Institute for Defence study, Tokyo 2007, p.84
- E.A. Laksmana, "Indonesia's dance with the titans", *Today online*, 27 March 2010, <http://www.toddayonline.com/print/weekendvoices>
- Natalegawa sebagaimana yang dikutip oleh S.Adam, "Indonesia key to Resolving tension in South China Sea", *Epoch Times*, 7 September 2012
- D.F. Anwar, "Posisi dan Peran Strategis Indonesia dalam konstalasi Politik Internasional"(Indonesia's strategic position and role in the constellation of International Politic) , in S. Hartono; H. Djarab and L.Irahali (eds), *Semangat Kebangsaan dan Politik Luar Negeri Indonesia* (the Spirit of Nationality and Indonesia's Foreign Policy), Angkasa Bandung, 2002, p.502
- S. Hadi, "Indonesia, ASEAN and the Rise of China : Indonesia in the midst of East Asia's Dynamics in Post-Global Crisis World", *International Journal of China Studies*, V.3, No.2, Agustus 2012, 151-166, p.155
- R.L. Schweller, "Managing the rise of great powers : history an theory" in A.I. Johnston an R.S. Ross

Sofia Trisni, Apriwan & Poppy Irawan | Strategi Indonesia dalam Merespon
Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Laut
Tiongkok Selatan)

- (eds), *Engaging China*,
Routledge, 1999, p.14,
Presiden SBY, Keynote speech at the
launching of the Strategic Review
Journal”, New York 26
September 2012
- G.Zhiguo, “South China Sea : Turning
Suspicion into Mutual
Understanding and Cooperation”
in Saw Swee-Hock, Sheng Lijun
& Chin Kin wah (eds), *ASEAN –
China Relations Realities and
Prospect*, ISEAS, Singapore
2005, p.330
- M. Weasley. “ What’s at stake in the
South China Sea”, *Lowy Institute
for International Policy*, 2012,
[http://www.lowyinstitute.org/pub
lications/whats-stake-south-china](http://www.lowyinstitute.org/publications/whats-stake-south-china)
view 6 Sep 2012,p.1
- A.S.P. Baviera. 'The South China Sea
Disputes after the 2002
Declaration : Beyond Confident
Building' in Saw Swee-Hock,
Sheng Lijun & Chin Kin wah
(ed), *ASEAN –China Relations
Realities and Prospect*, ISEAS,
Singapore 2005, p. 344
- S. Hongfang, “South China Sea Issue in
China-ASEAN Relations : An
Alternative Approach to Ease the
Tension”, *International Journal
of China Studies*, V.2, No.3, Dec
2011,pp. 585-600, p.588
- President Yudhoyono as quoted by Antara,
“ Presiden soroti potensi konflik
perbatasan sebagai
tantangan”Presidenthighlighted
- thepotential ofthe
borderconflictas a challenge,
SHNews, 16 August 2012, view
online
[http://www.shnews.co/detile-
6473-presiden-soroti-potensi-
konflik-perbatasan-sebagai-
tantangan.html](http://www.shnews.co/detile-6473-presiden-soroti-potensi-konflik-perbatasan-sebagai-tantangan.html) 22 October 2012
- Embassy of PRC in Indonesia, “Sekilas
Hubungan bilateral ” (bilateral
relations of China—Indonesia),
[http://id.china-
embassy.org/indo/zgyyn/sbgxgk/](http://id.china-embassy.org/indo/zgyyn/sbgxgk/)
view online 15 November 2013
- A. L. Smith, “From Latent Threat to
Possible Partner : Indonesia’s
China Debate”, *Asia-Pacific
Centre for Security Study Special
Assessment*, 2003, view online 16
April 2013
[http://www.apcss.org/Publication
s/SAS/ChinaDebate/ChinaDebate
_SmithIndo.pdf](http://www.apcss.org/Publications/SAS/ChinaDebate/ChinaDebate_SmithIndo.pdf), p.2
- R.Sokolsky, A. Rabasa & C.R Neu,
*ASEAN Perceptions of Rising
China*, RAND, 2000, p.38
- J.M van der Kroef, “Normalizing’
Relations with China :
Indonesia’s Policies and
Perceptions”, *Asian Survey*,
Vol.26. No.8 (1986), pp.909-934 :
909
- I.J Storey, “Indonesia’s China Policy in
the New Order and Beyond :
Problems and Prospect”,
Contemporary Southeast Asia,
Vol. 22, No.1 (2000), pp.145-174
:148

Sofia Trisni, Apriwan & Poppy Irawan | Strategi Indonesia dalam Merespon
Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Laut
Tiongkok Selatan)

- G. Nabbs-Keller, "Growing Convergence, Greater Consequence : The Strategic Implications of Closer Indonesia-China Relations", *Security Challenges, Vol. 7 No.3*, 2011, pp.23-41, p.27
- A.L. Smith, "Indonesia's Foreign Policy under Aburrahman Wahid : Radical of Status Quo State?", *Contemporary Southeast Asia, V.22, No.3*, December 2000, 498-525 : 512
- R. Sukma , "Indonesia's response to the rise of China : Growing Comfort amid Uncertainties" in Jun Tsunekawa (eds) *The Rise of China : Responses from Southeast Asia and Japan*, Tokyo 2009, pp. 145-7
- L.C. Sebastian, "Indonesia regional diplomacy : Imperative to maintain ASEAN cohesion", *RSIS Commentaries* No.132/2012, 23 July 2012
- D. Blumenthal as quoted by P.Barta, "Sea Dispute Upends Asian Summit", *The Wall Street Journal*, 23 July 2012, view online <http://www.intellectualtakeout.org/library/articles-commentary-blog/sea-dispute-upends-asian-summit> 11 September 2012
- R. Sukma , "Indonesia's response to the rise of China : Growing Comfort amid Uncertainties" in Jun Tsunekawa (eds) *The Rise of China : Responses from Southeast Asia and Japan*, Tokyo
- J. D.Ciorciari,., *The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers since 1975*, Georgetown University Press, Washington D.C., 2010.p.135
- M.C.Ott, "Deep Danger : Competing claim in the South China Sea", *China and East Asia*, V.110, Issue 737, September 2011, 238
- W. Lam, "Beijing's Aggressive New Foreign Policy and implications for the South China Sea", *China Brief*, Vo. XIII, Issue 13, June 12, 2013, p.12
- Swaine and Fravel, "China's assertive behaviour, Part Two : The Maritime Periphery", *China Leadership Monitor* No.35 2012, p.5
- C. Ungerer, "Making mischief : the return of the South China Sea dispute" *ASPI Special Report*, Issue 36, December 2010, p.1
- I. Storey, "Slipping away? A south China Sea Code of Conduct Eludes Diplomatic efforts", *East and South China Seas Bulletin* No,11, Center for a new American Security, March 20, 2013, p.3
- Storey, Making mischief : the return of the South China Sea dispute" *ASPI Special Report*, Issue 36, December 2010,p.7
- J.P Rowan, "The U.S – Japan security alliance, ASEAN and the South China Sea Dispute", *Asia Survey*,

M. Weasley, "What Stake in the South
China Sea", *Lowy Institute for
International Policy*, 2012,
[http://www.lowyinstitute.org/pub
lications/whats-stake-south-china](http://www.lowyinstitute.org/publications/whats-stake-south-china)
view 6 Sep 2012,p.5

D. Safitri, "Kartu Indonesia dalam konflik
Laut China selatan", *BBC
Indonesia*, 15 July 2013, view
online
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/b
erita_indonesia/2013/07/130614_
indonesiadefencedynamic.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/b
erita_indonesia/2013/07/130614_
indonesiadefencedynamic.shtml),
21 October 2013

J. Sudarsono as quoted by N. Onishi,
"Obama and China play rival
suitors to Indonesia", *The New
York Times*, 9 November 2010
view online
[http://www.nytimes.com/2010/11
/10/world/asia/10indo.html?_r=0](http://www.nytimes.com/2010/11
/10/world/asia/10indo.html?_r=0),
accessed 26 November 2013

S. Hadi, "Indonesia, ASEAN, and the Rise
of China : Indonesia in the Midst of
East Asia's Dynamics in the Post-
Global Crisis World", *International
Journal of China Studies Vol.3 No.2*,
August 2012, pp.151-166 : 161